

**ANALISIS TINGKAT KEPUASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA AIR HITAM  
KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**HANAFI  
NIM. 5115**

**Program Studi  
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**ANALISIS TINGKAT KEPUASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA AIR HITAM  
KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**HANAFI  
NIM. 5115**

**Program Studi  
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanafi

NIM : 51151015

Tempat, Tanggal Lahir : Air Hitam, 16 November 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun II Desa Air Hitam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT KEPUASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA AIR HITAM KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 21 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,

**Hanafi**

**NIM. 51151015**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS TINGKAT KEPUASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA AIR HITAM  
KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA**

Oleh:

**Hanafi  
NIM. 51151015**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 21 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA**  
**NIP. 196506282003021006**

**Imsar, SE, M.S.I**  
**NIP. 198703032015031004**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

**Dr. Marliyah, M.Ag**  
**NIP.197601262003122003**

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Analisis Tingkat Kepuasan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara**”. Atas nama Hanafi. Di bawah bimbingan Dr Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA sebagai Pembimbing I dan Imsar, SE, M.S.I sebagai Pembimbing II.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur yang masi belum mendapat respon baik dari masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Air Hitam yang kurang berkontribusi bagi proses pembangunan. Permasalahan yang terjadi adalah rumah penduduk dan jalan lintas di berbagai dusun seperti Dusun VII masih sering tergenang air ketika musim hujan, saluran pembuangan air rumah tangga maupun pertanian juga tidak lancar dan kurang memadai sehingga mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan sarana air bersih, masih banyak jalan yang belum di lapis dan di aspal. Sehingga banyak jalan menjadi rusak dan perlu di beton, masyarakat desa sulit untuk beraktifitas karena sarana penghubung antar dusun dan transportasi ke lahan pertanian kurang memadai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pembangunan infrastruktur Desa Air Hitam karena merasa bahwa kualitas kinerja pemerintahan Desa Air Hitam dinilai belum maksimal dan manfaat yang didapat masyarakat belum merata. Partisipasi masyarakat diindikasikan sudah baik karena masyarakat pada awalnya turut bergotong – royong membersihkan lahan yang akan digunakan, serta pembuatan jalan baru tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam bentuk partisipasinya salah satunya dapat ditunjukkan dengan parsipasi aktif dalam bentuk pengawasan pembangunan.

Kata Kunci: *Kepuasan, Partisipasi Masyarakat, dan Pembangunan Infrastruktur*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Rasa syukur kepada-Nya atas karunia dan memberikan penulis kesehatankekuatan dan semangat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Analisis Tingkat Kepuasan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara**”. Serta shalawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, teladan terbaik bagi manusia sepanjang Zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu penulis di dalam menyusun skripsi ini kepada::

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
2. Ayahanda Tercinta *Idham khalif* dan Ibunda Tercinta *Herlina*, yang telah memberikan dukungan baik melalui do'a maupun materil yang tak terhingga jumlahnya hingga saat ini.
3. Kakak/Abang terbaik *Tika Prandika* dan *Edi Gunawan* yang telah memberikan do'a dan semangat kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak *Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag* selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak *Dr. Andri Soemitra, MA* selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

6. Ibu ***Dr. Marliyah, MA*** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak ***Imsar M.Si*** selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak ***Dr. Muhammad Ridwan, MA*** selaku Pembimbing Akademik.
9. Kedua pembimbing skripsi saya yaitu Bapak ***Dr Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA*** selaku Pembimbing Skripsi I, dan kepada Bapak ***Imsar, SE, M.S.I*** selaku Pembimbing Skripsi II.
10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
11. Kepala Desa, Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, beserta jajarannya yang telah bersedia membantu penulis untuk melaksanakan penelitian.
12. Adinda ***May Indah Jelita Putri*** yang selalu mensupport dan mendampingi berjuang sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini segera.
13. Teman – teman seperjuangan ***Ekonomi Islam D 2015*** yang telah berjuang bersama dan saling memberikan semangat dan bantuan satu sama lain.
14. Kepada teman – teman seperjuangan ***Ali amzah SE, Almanar saragih SE, Mhd Abdul Harits, Firman Hasibuan SE, Mhd Hafiz Hanif Mulki MTD, Amarah Khairani Lubis SE, Nurhaliza SE, Rika Wahyuni, Mira Fadillah*** yang telah berdo'a serta saling menguatkan satu sama lain.
15. Kepada teman – teman Masjid ***Wasiso SP, Yudi Pratama, Khairul Muslim, Ikbal Ali*** yang saling memberikan do'a dan dukungan.
16. Terima kasih kepada seluruh teman dan sahabat serta pihak – pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu mendukung, mendo'akan serta membatu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang lebih indah selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan dari Bapak/Ibu dan semua sahabat yang membantu dan mendukung penulis. Semoga yang diberikan menjadi amal shalih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna demi kesempurnaan

penelitian ini dan penelitian selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, 21 Oktober 2019

Penulis,

**Hanafi**

**NIM. 51151015**



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II    KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Pemerintahan.....	11
B. Pembangunan .....	12
C. Infrastruktur.....	22
D. Sistem Infrastruktur.....	24
E. Pedesaan.....	27
F. Kepuasan Masyarakat .....	30
G. Partisipasi Masyarakat .....	34
H. Penelitian Terdahulu .....	40
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42

C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisa Data.....	44

#### **BAB IV    TEMUAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Air Hitam Batu Bara.....	45
1. Demografi.....	45
2. Kependudukan.....	46
3. Mata Pencapaian Pokok.....	48
4. Pendidikan.....	49
5. Pemerintahan.....	49
a. Visi dan Misi.....	50
b. Struktur Organisasi.....	51
6. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	53
7. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	54
8. Kebijakan Umum Anggaran.....	54
B. Pembahasan.....	54
1. Pembangunan Infrastruktur Desa.....	54
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.....	59
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.....	63
4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.....	70

#### **BAB V    PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
--------------------	----

B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1.1 Jumlah Penduduk Desa Air Hitam Batu Bara .....	5
4.1 Luas Wilayah Desa Air Hitam.....	46
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun .....	47
4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	47
4.5 Sarana Tempat Ibadah Desa Air Hitam .....	48
4.6 Mata Pencaharian Penduduk.....	49
4.7 Pendidikan masyarakat Desa Air Hitam.....	49
4.8 Pemerintahan Desa Air Hitam .....	52
4.9 Laporan Kegiatan Rutinitas Gotong Royong Masyarakat Desa Air Hitam Batu Bara .....	66

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Gambar**

### **Hal**

1.1	Diagram Tingkat Kepuasan Masyarakat Desa Air Hitam Berdasarkan Hasil Pra Survey, 2019 .....	6
4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Air Hitam Batu Bara.....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Hal</b>
1 Transkrip Wawancara .....	83
2 Laporan Kegiatan Rutinitas Gotong Royong Masyarakat Desa Air Hitam Batu Bara .....	86
3 Dokumentasi .....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah sebagai layanan publik bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, dengan demikian memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung kepada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata system pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat yang berkewajiban sebagai abdi negara, baik dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan masyarakat di berbagai bidang. Kepuasan masyarakat merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari masyarakat dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya kesetiaan yang berlanjut. Faktor yang paling penting untuk menciptakan kepuasan masyarakat adalah kinerja dari pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat perwujudannya terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi serta tujuan yang akan dicapai dari sebuah kebijakan. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan yang harus dilaksanakan pemerintah serta tanggung jawab terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Melalui kepercayaan yang di berikan masyarakat, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam menelenggarakan Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup>

Dalam kaitannya dengan proses Pembangunan, Desa merupakan suatu wilayah yang masih sangat perlu untuk dijadikan sebagai titik dari sebuah pembangunan. Membangun Desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini mudah dimengerti karena lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di desa-desa di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan demikian pembangunan desa harus dijadikan titik sentral pembangunan Nasional. Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung dibawah kecamatan dan berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri.<sup>2</sup>

Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang, di banding dengan desa yang belum

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, Pasal 1, Ayat 41.

<sup>2</sup>Ibid Sadu Wasistio. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2006), h. 212



memiliki infrastruktur yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan dari segala ukuran keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.<sup>3</sup>

Pada dasarnya suatu pembangunan infrastruktur bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan pemerintah adalah harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya.

Pemerintah harus terus berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, karena salah satu penilaian tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari kemajuan pembangunan infrastruktur daerah tersebut. Maka keterlibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak.

Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata pada pihak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tersebut di atas peran serta masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya sudah sangat besar, hal ini ditandai dengan adanya sumbangan berupa tenaga, pendanaan, tanah pekarangan, material.

Desa Air Hitam terletak di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang memiliki luas  $\pm$  1620 Ha. Umumnya komoditi terbesar yang terdapat di desa Air Hitam ini adalah padi sawah dan kebun kelapa sawit. Dan rata-rata masyarakat Desa Air Hitam bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sehingga, infrastruktur desa berupa jalan lintas, saluran pembuangan air, parit

---

<sup>3</sup>Abi Praja Soedjono. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga Press, 2002), h. 37

jalan, penerangan jalan, serta sarana dan prasarana lainnya sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat desa untuk melakukan aktivitasnya.

Namun, adanya permasalahan yang terjadi mengenai infrastruktur dan fasilitas Desa Air Hitam adalah rumah penduduk dan jalan lintas di berbagai dusun seperti Dusun VII masih sering tergenang air ketika musim hujan. Hal ini terjadi akibat parit di sepanjang jalan belum di lening atau di beton. Akibatnya jalan menjadi tergenang karena air hujan tidak dapat mengalir dan badan jalan mengalami erosi. Selain itu, saluran pembuangan air rumah tangga maupun pertanian juga tidak lancar dan kurang memadai sehingga mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan sarana air bersih di desa.

Mengenai jalan lintas antar dusun, masih banyak jalan yang belum di lapis dan di aspal. Sehingga banyak jalan menjadi rusak dan perlu di beton. Karena kondisi jalan lintas yang belum memadai, akibatnya masyarakat desa sulit untuk beraktifitas karena sarana penghubung antar dusun dan transportasi ke lahan pertanian kurang memadai.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan di Desa Air Hitam, Pemerintah setempat sudah melakukan peran dengan semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Akan tetapi terdapat kendala di dalamnya yaitu kurangnya lahan untuk di jadikan tempat pembangunan yang berakibat Pemerintah setempat sulit untuk melakukan pembangunan. Banyak masyarakat yang masih belum ingin untuk menyerahkan lahan nya sebagai pembangunan infrastruktur desa tanpa adanya imbalan.

Menurut Bapak Alpian selaku Kepala Desa Air Hitam:

*“Sudah terjadi beberapa kali kegagalan dalam pembangunan. Hal tersebut di akibatkan karena masyarakat menginginkan agar tanah yang akan di gunakan untuk pembangunan di desa sekiranya dapat di berikan berupa uang ganti rugi”.*<sup>4</sup>

Proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas di Desa Air Hitam ini masih belum mendapat hasil yang baik dan manfaat yang merata bagi masyarakat, karena pemerintah kurang berperan dalam memperbaiki sarana dan prasarana desa. Selain itu, dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala dalam pembiayaan atau pendanaan desa, tetapi juga masalah dalam kekurangan lahan. Terjadi penolakan dari masyarakat untuk menyerahkan lahannya karena masyarakat adanya ketidaksesuaian dan kejelasan antara infrastruktur yang dibangun dengan kebutuhan mereka, serta manfaat apa yang mereka dapatkan.

Permasalahan lainnya adalah tidak ada alokasi dana khusus yang di berikan berupa penggantian untuk lahan masyarakat. Melihat kondisi di Desa Air Hitam yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh tani yang menggantungkan kehidupannya pada hasil pertanian, maka pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa berupa jalan lintas, parit dan saluran pembuangan air yang lebih baik merupakan salah satu upaya pemerintah setempat dalam membantu memudahkan masyarakat desa yang ingin melakukan aktivitas pekerjaannya.

Pemerintah Desa Air Hitam sudah melakukan proses pembangunan infrastruktur seperti pengerasan jalan dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi terdapat kendala yaitu tidak meratanya pengerasan jalan yang ada di desa tersebut.

Bapak Joko selaku masyarakat mengatakan:

*“Lebih kurang sudah sepuluh tahun belakangan ini pembangunan jalan desa cuma sampai di situ-situ saja, pembangunan yang lain pun belum maksimal dan belum merata di semua dusun”.*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Bapak Alpian, Hasil Wawancara Pribadi, Kepala Desa Air Hitam, (Batubara, 25 Mei 2019 Pukul 14.00 WIB)

Dilihat dari data jumlah penduduk yang tercatat pada data administrasi Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ini terbilang cukup banyak yaitu 3,969 jiwa, dengan demikian pemerintah perlu sekali untuk memikirkan tingkat pelayanan publik yang baik agar masyarakat dapat tepenuhi haknya sebagai masyarakat. Jumlah penduduk Desa Air Hitam dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Air Hitam Batu Bara**

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Laki - Laki	1.991
2	Perempuan	1.978
<b>Jumlah</b>		<b>3.969</b>

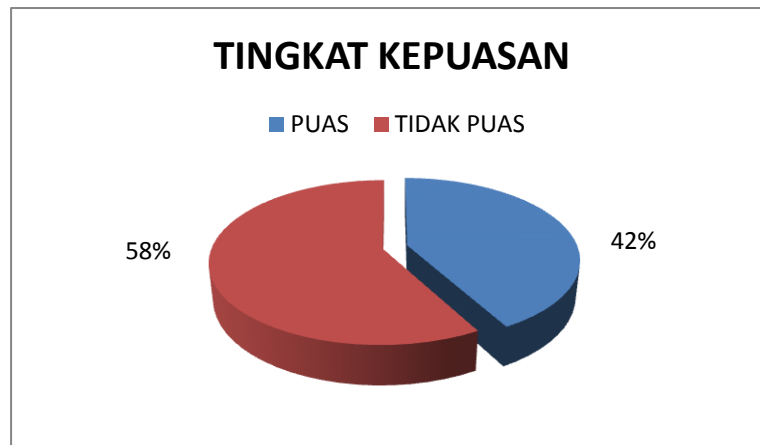
*(Sumber: Buku Administrasi Desa Air Hitam, 2015)*

Dalam pelayanan publik, pelanggan adalah masyarakat. Dan instansi pemerintah harus bisa memuaskan masyarakat. Jika masyarakat tidak terpuaskan oleh pelayanan pemerintah, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Untuk itulah diperlukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat sehingga bisa dilakukan perbaikan yang lebih baik dan penyebab ketidakpuasan masyarakat desa.

Infrastruktur jalan merujuk pada sistem fisik yang menyediakan fasilitas publik dan pembangunan jalan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

---

<sup>5</sup>Bapak Joko, Hasil Wawancara Pribadi, Tokoh Masyarakat Desa Air Hitam, (Batubara, 25 Mei 2019 Pukul 15.30 WIB)



**(Gambar 1.1 Diagram Tingkat Kepuasan Masyarakat Desa Air Hitam Berdasarkan Hasil Pra Survey, 2019)**

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa kepuasan masyarakat Desa Aiar Hitam sekitar 58% masyarakat Desa Air Hitam merasa tidak puas dan sekitar 42 % merasa puas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Air Hitam merasa tidak puas terhadap Pembangunan Infrastruktur mengenai kualitas kerja pemerintah yang diberikan berupa pembangunan jalan yang dinilai lambat.

Kepuasan masyarakat merupakan tingkat rasa setelah membandingkan tingkat kinerja yang dengan harapannya ,dimana tingkat kinerja yang diberikan Pemerintahan Desa Air Hitam masih belum memenuhi harapan masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak puas terhadap Pembangunan Desa Air Hitam.

Dalam meningkatkan perekonomian daerah dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat yaitu dengan diadakannya program pemerintah salah satunya adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Batubara. Program ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat perdesaan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan mengenai infrastruktur di perdesaan.

Berdasarkan observasi, masih terjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan yang terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti gotong royong dalam pembangunan desa. Seperti berkurangnya partisipasi dalam kerja bakti yang seharusnya dilakukan warga setiap sabtu dan minggu.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga yang mulai memudar seperti membersihkan saluran air, perbaikan jalan lintas dusun, membersihkan lingkungan kantor desa, siskamling, kurangnya kegiatan kelompok tani dan ibu rumah tangga serta kegiatan lain yang membutuhkan partisipasi langsung dari

masyarakat. Padahal, budaya gotong royong adalah identitas nasional, karena budaya gotong royong seharusnya terus dijaga agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, proses pembangunan infrastruktur desa terkesan lamban dan keberlanjutan program pemerintahan mengenai pembangunan belum terwujud dengan baik.

Tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan disegala bidang sangat diharapkan dalam organisasi pemerintahan, agar pembangunan tidak dirasakan oleh orang-orang tertentu saja dan ini tergantung bagaimana aparat pemerintah Desa Air Hitam dapat mengajak masyarakat untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.

Saat ini masalah pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur jalan menjadi agenda penting untuk diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah daerah, karena infrastruktur jalan merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan diantaranya untuk mencapai target pembangunan ekonomi demi mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada dipedesaan.

Lancarnya arus jalan atau lalu lintas darat akan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan prasarana dan prasarana transportasi jalan akan mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulik tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Tingkat Kepuasan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
2. Faktor – faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
3. Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain yaitu:

1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam hal kepenulisan dan analisis

khususnya yang berfokus pada kajian tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur daerah.

2. Bagi Masyarakat Umum

Untuk memberikan uraian bahwa tingkat kepuasan dan partisipasi dari masyarakat dapat mempengaruhi dan mempermudah proses pembangunan infrastruktur desa.

3. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi pihak lain dan sebagai landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pemerintahan**

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.<sup>6</sup>

Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.<sup>7</sup> Di samping itu dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>8</sup>

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Diperlukan adanya sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan.

---

<sup>6</sup>Poerwadarminta. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka, 2003), h. 60

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Pemerintahan desa pada dasarnya merupakan manifestasi dari pemerintahan daerah yang berbasis pada otonomi daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintahan desa berkaitan dengan tumbuhnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka dapatkan.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Pengelolaan pembangunan desa oleh pemerintah pada akhirnya menuntut pendekatan secara holistik, apalagi pembangunan desa sekarang ini, dalam tataran geraknya mencakup juga berbagai aspek kehidupan sejak dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta ideologi.

## **B. Pembangunan**

Pembangunan yaitu proses perubahan yang dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal.

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Melalui pembangunan, kemakmuran, taraf hidup dan

lapangan kerja baru bisa menjadi lebih baik, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Penduduk, modal (kapitalisme) dan kewirausahaan merupakan faktor penting dalam pembangunan.<sup>9</sup>

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong.<sup>10</sup>

Pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses dimana orang-orang disitu bersama-sama dengan pejabat-pejabat Pemerintahan berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan Bangsa dan Negara.<sup>11</sup>

Pembangunan masyarakat desa meliputi dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan - bantuan teknik dan lainnya sehingga memajukan inisiatif mereka sendiri dan saling membantu.<sup>12</sup>

Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota, hal ini juga dapat

---

<sup>9</sup>Isnaini Harahap, "Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner". (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 26

<sup>10</sup>Irwani M Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan Desa*, (Jakarta: Duta Aksara, 2002) h.12.

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 14

membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.<sup>13</sup>

Disamping itu, sebagai proses mobilisasi sumber daya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga stakeholders pembangunan, yaitu Negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional atau nasional.<sup>14</sup> Pembangunan desa menempatkan dirinya kedalam 3 sifat, yaitu:

1. Sebagai metode pembangunan, dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan pedesaan karena sebagian besar masyarakat adalah tinggal dan berusaha didesa, masyarakat adalah subyek pembangunan.
2. Sebagai program yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya didesa dan memerlukan keikutsertaan masyarakat desa.
3. Sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh dipedesaan sebagai gerakan. Diperlukan kemampuan menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan wilayah dan perkotaan memiliki sejarah yang cukup panjang dengan berbagai pendapat dan pandangan yang sangat beragam. Setelah perang dunia kedua kegiatan perencanaan perkotaan mengalami kemajuan yang sangat pesat akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan. yang menggunakan instrumen observasi dan pengalaman sebagai dasar analisis, permasalahan sosial yang pelik dipecahkan dengan cara menerapkan peraturan berjenjang dari pemerintah, terutama di level nasional. Perangkat di daerah

---

<sup>13</sup>Fahrul Ridha, "Analisis Pengelolaan Dana Desa", *At-tawasuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, h. 255

<sup>14</sup>Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), h. 27

merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat sebagai pelaksana pembangunan.<sup>15</sup>

Strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagi informasi, merumuskan tujuan, mensetting kebijakan, mengalokasikan sumber - sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil-hasilnya.<sup>16</sup>

Pembangunan bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut.<sup>17</sup>

Oleh karena itu pembangunan Desa dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan tindak lanjutnya, harus diorientasikan pada pengikutsertaan masyarakat, begitupun bentuk-bentuk organisasi pembangunan desa harus menggunakan sistem dan prosedur yang selalu memperhitungkan dan memberikan peluang bagi terselenggaranya partisipasi masyarakat secara maksimal.

Keterlibatan/pelibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program pembangunan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan. Yakni pembangunan yang berkelanjutan dan dapat mensejahterakan masyarakat.

---

<sup>15</sup>Teraik Kogoya, Benu Olfie, dan Olly Esry Laoh. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15, No. 2, 2015, Universitas Sam Ratulangi, h. 4

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>Fahrul Ridha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa*, h. 257

Oleh karena itu masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan perlu benar-benar diperhitungkan.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci Al-Quran dalam Surah Ar-Ra'd Ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya:

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”<sup>18</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, yang menyebutkan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

---

<sup>18</sup>Moh Rifa'i. *Tafsîr al-Qur'an al-Karim; Terjemah/Tafsir Al-Qur'an*. (Semarang: Wicaksana, 1993), h. 89

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dapat memiliki motivasi. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.

Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur juga bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat.

Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada satu kesepakatan bahwa Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat pembangunan itu.<sup>19</sup>

Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

---

<sup>19</sup>Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah *Perencanaan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, ( Jakarta: Gramedia Utama 2004), h. 14

<sup>20</sup>Kodoatie, R. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), h. 54-55

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, dan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Konsep pembangunan Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Melainkan memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari pihak rakyat. Dia tidak memberikan gambaran mengenai adanya gerakan menuju keadaan perubahan mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi menurut Malthus proses pembangunan adalah suatu proses naik-turunnya aktivitas ekonomi (pertumbuhan ekonomi) lebih dari pada lancar tidaknya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Malthus kaitannya pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi adalah akibat proses pembangunan. Menurut Malthus: "pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding". Malthus membagi perekonomian menjadi sector pertanian dan industri. Kemajuan teknologi dari dua sector tersebutlah yang dapat membawa kepada pembangunan ekonomi.<sup>22</sup>

Menurut teori Malthus penyebab utama keterbelakangan rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah. Pemerintahan daerah untuk pembangunan harus memaksimalkan produksi disektor pertanian dan industri karena dua sector itulah yang membawa kepada pembangunan ekonomi disuatu daerah. Selain itu terdapat factor nonekonomi seperti disektor kesehatan, pendidikan standar moral, kebiasaan

---

<sup>21</sup>Thomas Robert Malthus, "*The Essay on The Principle of Population*" <http://www.ajarekonomi.com>, (Diakses pada tanggal 24 Mei 2019).

<sup>22</sup>*Ibid*



pekerja keras, Administrasi yang baik dan hokum yang efesien yang dapat membantu meningkatkan produksi didua sector tersebut. Jadi factor ekonomi dan nonekonomi ini dua-duanya dapat membawa kearah pertumbuhan ekonomi.

Menurut Schumpeter pembangunan adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus dalam saluran arus perubahan tersebut, gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya. Perubahan dalam kehidupan ekonomi yang spontan dan terputus-putus ini tidak jauh dari luar pertumbuhan ekonomi, akan tetapi timbul atas inisiatif perekonomian itu sendiri.<sup>23</sup>

Menurut Todaro pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro mendefenisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimendial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.<sup>24</sup>

Tujuan Pembangunan ada dua tahap. “pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan –kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.<sup>25</sup>

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan.

---

<sup>23</sup>Dwi Sosilowati, *Pengantar Ekonomi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2011) h. 115

<sup>24</sup>Michael R.Todaro Stephen C.Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi kesebelas (Jakarta: Penerbit Elrangga, 2001), h. 63

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 71

Menurut Solekhan, pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antara desa dalam satu Kabupaten/Kota, yang meliputi:<sup>26</sup>

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan.

Dalam perspektif islam, pembangunan ekonomi bersifat material dan spiritual. Yang mencakup sumber daya manusia (SDM), sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan lainnya. Dampak pembangunan dalam islam adalah menyeluruh sebagaimana konsep islam sebagai agama yang menyeluruh. Bukan hany ekonomi yang bersifat material tetapi juga pembangunan nonmaterial yang bersifat spiritual, akhlak, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Ada lima utama pembangunan dalam islam, yaitu:

1. Konsep pembangunan berlandaskan tauhid, khalifah dan tazkiyah.
2. Aspek pembangunan meliputi fisik dan moral spiritual.
3. Fokus utama pembangunan adalah manusia sebagai subjek dan objek pembangunan guna mencapai kesejahteraan.
4. Fungsi dan peran pemerintah (daerah).
5. Skala waktu pembangunan meliputi dunia dan akhirat

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islâm adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan

---

<sup>26</sup> Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2012), h. 89

pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.<sup>27</sup>

Manusia berada dalam kapasitas kolektifnya, seperti ummah (komunitas) dan qawm (golongan). Sebuah kolektifitas mempunyai tanggung jawab penuh atas nasib diri sendiri. Demikianlah maka anjuran untuk tolong menolong dalam kebajikan (al-birr) dapat ditafsirkan bahwa sebuah kolektifitas diserukan untuk merekayasa kehidupannya, tidak lepas begitu saja. Kebajikan (al-birr) yang tertinggi itu dihubungkan dengan masalah ekonomi dapat disimpulkan dalam surat Ali ‘Imran [3]: 92, sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ عَشْيِ الْغَيْنِ اللَّهُ عَلِيمٌ بِهِ

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*”. (QS. Âli ‘Imrân [3]: 92).<sup>28</sup>

Hal tersebut merupakan pengakuan bahwa kepentingan ekonomilah yang menjadi ukuran kebajikan sosial. Karena itu, rekayasa sosial atas ekonomi adalah suatu kebajikan (al-birr). Bahwa masalah ekonomi mendapat perhatian utama, terutama bila dihubungkan dengan kemiskinan.

Seperti Nabi Muhammad SAW Setelah membangun masjid untuk ibadah dan pendidikan, Muhammad segera membangun sejumlah peraturan terkait masalah perdagangan berdasarkan prinsip perdagangan bebas, keadilan, kejujuran, dan antimonopoli.

Dan Khalifah Umar bin Khattab r.a juga membangun kanal dari pusat kelaut merah, sehingga orang yang membawa gandum ke kairo tidak perlu lagi

---

<sup>27</sup>Fadlan. “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam: Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera”, *Al-Ihkam*, Vol. 5, No. 2, 2010, h. 264

<sup>28</sup>Moh Rifa’i. *Tafsîr al-Qur’an al-Karim; Terjemah/Tafsir Al-Qur’an*. (Semarang: Wicaksana, 1993), h. 137

naik onta karena mereka bisa menyebrang dari Sinal langsung menuju Laut Merah juga menginstruksikan kepada gubernurnya di Mesir untuk membelanjakan minimal 1/3 dari pengeluarannya untuk infrastruktur.<sup>29</sup>

### **C. Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktifitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Infrastruktur, merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dalam hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara system social dan system ekonomi.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Kesediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai

---

<sup>29</sup>Adiwarman A. Karim , *Ekonomi Makro Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 56

dasar – dasar dalam mengambil kebijakan. Gigg membagi infrastruktur dalam 13 katagori yaitu:<sup>30</sup>

1. Sistem penyediaan air: waduk, penampungan air, tranmisi dan distribusi, fasilitas pengolaan air.
2. Sistem pengolaan air limbah: pengumpulan,pengelolaan, pembuangan dan daur ulang.
3. Fasilitas pengelolaan limbah
4. Fasilitas pengendapan banjir
5. Fasilitas navigasi dan transportasi
6. System transit *public*
7. System kelistrikan
8. Fasilitas gas alam
9. Gedung public, kantor, sekolah, rumah sakit
10. Fasilitas perumahan public
11. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion
12. Komunikasi

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakat perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.

---

<sup>30</sup>RJ Kodoatie *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), h. 60

3. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya.

#### **D. Sistem Infrastruktur**

Menurut Grigg, Sistem infrastruktur merupakan merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.<sup>31</sup> Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2005, jenis Infrastruktur mencakup:

1. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
2. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
3. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
4. Infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
5. Infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
6. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
7. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan

---

<sup>31</sup>Nurmadimah, F., 2012. Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UPT dengan Skema KPS. *Tesis*. Universitas Indonesia, h. 20

8. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.

Infrastruktur dinyatakan pula sebagai aset fisik yang dirancang dalam sistem pelayanan publik yang penting terbagidalam 7 kategori utama. Namun dalam penetapan kategori infrastruktur ini terdapat beberapa perbedaan antara program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) dengan Grigg, Hudson, Kodoatie maupun Supirin.<sup>32</sup>

Pengkategorian dalam program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) tidak menyertakan bangunan gedung dan fasilitas rekreasi, serta memisahkan pengelolaan air bersih dengan air kotor, sedangkan Grigg maupun Hudson mengkategorikan pengelolaan air bersih, air limbah dan drainase pada satu kategori dan menyertakan serta memasukan bangunan gedung dan fasilitas rekreasi pada kategori terpisah.<sup>33</sup>

Infrastruktur Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Adanya jalan yang baik merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah perkotaan, selain itu jalan bertujuan untuk mendukung mobilitas barang dan penumpang antar pusat kota dengan kawasan industri dan jasa, perkantoran dan kawasan perumahan dan pemukiman

---

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>*Ibid*

serta daerah pinggiran. Desa juga bertujuan untuk menunjang fungsi desa sebagai pusat pertumbuhan dan mendorong pemerataan pembangunan didalam desa.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1980, jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi bagaian jalan termasuk bangunanpelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Klasifikasi jalan dibagi menurut fungsi, kelas jalan, medan jalan, dan wewenang pembiayaan jalan. Adapun klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri atas 3 golongan yaitu:<sup>34</sup>

1. Jalan arteri yaitu yang melayani angkutan utama dengan cirri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efesien.
2. Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang. Kecepatan rata-rata sedang dan jalan masuk dibatasi.
3. Jalan local yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan cirri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan memiliki tujuan dan fungsi bagi perekonomian suatu daerah. Tujuan dan fungsi tersebut antara lain:

1. Dapat membuka akses atau jalan masuk dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang disebut sebagai fungsi line acces. Fungsi sangat penting untuk meningaktkan PDRB dan mengurangi daerah yang tertinggal.
2. Jalan berfungsi untuk pelayanan masyarakat setempat. Pada fungsi ini jalan dapat meberikan jasa-jasanya dalam proses pendistribusian produk dan ekonomi lainnya.

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998.



3. Jalan dapat memberikan pelayanan bagi angkutan masyarakat jarak jauh dan antar daerah .yang berfungsi sebagai *Interchange Community and Long Transportation*.

#### **E. Pedesaan**

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa: “Yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>35</sup>

Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perdesaan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.<sup>36</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan- batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

---

<sup>35</sup>Undang-Undang No 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Otonomi Daerah, h.14

<sup>36</sup>Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>37</sup>

Dalam definisi klasik, secara ekonomi kawasan perdesaan dikategorikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian sedangkan kawasan perkotaan dikategorikan sebagai wilayah dengan kegiatan utama di sektor jasa dan perdagangan.<sup>38</sup>

Munculnya kawasan perdesaan dengan perekonomian yang ditopang oleh kegiatan industri kecil seperti kerajinan, pariwisata, definisi tersebut dirasa belum dapat mewakili keseluruhan tipologi kawasan perdesaan. Oleh karenanya muncul istilah-istilah seperti desa-kota yang berusaha mendefinisikan kawasan-kawasan perdesaan yang dianggap memiliki ciri-ciri perkotaan baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi.<sup>39</sup>

Suhardjo mendefinisikan kawasan perdesaan sebagai kesatuan wilayah sosial/budaya, atau kesatuan wilayah administratif yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk menjelaskan kawasan perdesaan yang bias akibat mempunyai kemiripan dengan sifat kota. Kawasan tersebut sebagai kawasan desa-kota atau

kawasan perdesaan yang mempunyai ciri kota, yang biasanya terdapat di kawasan tepi area. Sedangkan dalam Kamus Tata Ruang 2008, desa-kota didefinisikan sebagai desa yang mata pencahariannya mirip dengan di kota, termasuk gaya hidup dan gaya perumahannya. Menggunakan pendekatan batasan fungsional, kawasan tersebut dicirikan dengan kesamaan fisik (perumahan) dan sosial budaya (mata pencaharian dan gaya hidup).<sup>40</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap kawasan definisi kawasan perdesaan yang akan diangkat dalam

---

<sup>37</sup>A.J. Suhardjo. *Geografi Perdesaan Sebuah Antologi*. (Yogyakarta: IdeAs Media, 2008), h. 76

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 79

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 84

<sup>40</sup>Ditjen Cipta Karya Depertemen Pekerjaan Umum. "Kamus Tata Ruang" .1997

penelitian. Kawasan perdesaan dapat diartikan dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan batasan administratif dan batasan fungsional sebagai berikut:

1. Dalam batasan administratif, kawasan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah administratif yang telah ditetapkan secara hukum.
2. Dalam pendekatan fungsional, kawasan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah fungsional yang memiliki ciri fisik dan sosial budaya tertentu dengan kegiatan ekonomi pertanian dan/atau pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam. Sehingga dalam definisi ini, kawasan sub-urban atau fringe area dengan ciri fisik perkotaan bukan dianggap sebagai kawasan perdesaan.

Maka berdasarkan pendekatan tersebut, Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara baik secara administratif maupun fungsional dapat dikategorikan sebagai kawasan perdesaan.

## **F. Kepuasan Masyarakat**

Menurut Philip Kotler, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-harapannya.<sup>41</sup>

Menurut Zeithaml dan Bitner kepuasan adalah respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang

---

<sup>41</sup>Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millenium, Jilid 2, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), h. 42

menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen.<sup>42</sup>

Kepuasan merupakan faktor-faktor dari dalam diri individu, yang menyebabkan mereka bertindak dengan cara tertentu. Jika tidak dikaitkan dengan kepuasan terhadap jasa pelayanan *public*, maka dapat diasumsikan bahwa kepuasan adalah respon seseorang terhadap harapan dan kualitas kinerja atau hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

Kepuasan masyarakat merupakan tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari masyarakat dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya kesetiaan yang berlanjut, semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan masyarakat semakin tinggi.<sup>43</sup>

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan pengguna merupakan alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil yang sama atau melampaui harapan pengguna, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pengguna.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka terdapat kesamaan definisi mengenai kepuasan, yaitu yang menyangkut komponen kepuasan (harapan dan kinerja hasil yang dirasakan). Umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan masyarakat tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang dan jasa).

Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli dan untuk menciptakan kepuasan masyarakat, organisasi publik harus menciptakan dan mengelola sistem

---

<sup>42</sup>Valeria A Zeithaml, and Mary Jo Bitner, 2000, "Service Marketing Integrating Customer Focus Across The Firm", Mc Grow Hill. (Diakses tanggal 23 Mei 2019), Dalam <http://www.qualitydigest.com/html/qualitydef.html.com>.

<sup>43</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 56

untuk memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan kemampuan mempertahankan masyarakat.

Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Dari defensi tentang kepuasan tersebut adanya suatu kesamaan makna bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu penilaian emosional dari pengguna setelah merasakan penggunaan suatu produk dimana harapan dan kebutuhan terpenuhi. Pengguna/masyarakat yang tidak puas mereka akan kecewa, dengan kekecewaan itu masyarakat akan melakukan complain, atau sama sekali tidak melakukan apa-apa.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/25/M.PAN/2/2004, kualitas pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur masyarakat dalam Kep. MENPAN ada 3 (tiga) yaitu: <sup>44</sup>

1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penataan sistem mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.
3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pembangunan, kepuasan masyarakat dapat diartikan sebagai respon dan hasil penilaian dari masyarakat bahwa konstruksi yang dibangun memberikan tingkat kenikmatan, kenyamanan, keamanan, keindahan dan lain sebagainya. Kepuasan masyarakat dapat dijabarkan ketika konstruksi yang dibangun memiliki dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelayanan publik oleh pemerintahan desa harus bersifat mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu

---

<sup>44</sup>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.

pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik (masyarakat).

Teknik pengukuran kepuasan masyarakat dapat menggunakan pengukuran secara langsung dengan pertanyaan atau pernyataan mengenai seberapa besar dampak dan pengharapan yang dirasakan masyarakat terhadap konstruksi tersebut.

Masyarakat atau responden menilai dan membandingkan kesesuaian antara apa yang diharapkan dan apa yang didapatkan dari sebuah konstruksi. Kepuasan akan tercapai bila terjadi kesamaan antara pengalaman mendapatkan dan merasakan dampak langsung dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat terhadap kualitas pembangunan yang didapatkan. Jadi harapan penghuni terhadap suatu konstruksi semestinya merupakan suatu standar untuk dibandingkan dengan keadaan, kondisi atau kualitas konstruksi yang sesungguhnya.

Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Menurut Harbani Pasolong, Semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat (high trust)<sup>45</sup>. Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut.<sup>45</sup>

KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyebutkan bahwa, “Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan”. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

---

<sup>45</sup>Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 221 - 222

Dalam pelayanan publik, pelanggan adalah masyarakat. Dan instansi pemerintah harus bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kepuasan pelanggan dapat diukur menggunakan berbagai metode pengukuran. Kotler secara sederhana mengemukakan empat metode yang dapat mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Sistem Keluhan dan Saran Setiap perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented) perlu memberikan kesempatan seluasluasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan. Media yang bisa digunakan adalah kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus (customer hot lines), dan lain-lain.
2. Survei Kepuasan Pelanggan Melalui survai, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggannya.
3. Lost Customer Analysis Perusahaan yang menggunakan metode ini untuk menganalisis kepuasan pelanggan dengan cara menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli atau telah beralih pemasok. Hasil dari metode ini akan diperoleh informasi penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat berguna bagi perusahaan untuk mengambil langkah kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

## **G. Partisipasi Masyarakat**

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*", artinya peran serta atau ambil bagian atau kegaitan bersama-sama dengan orang lain. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan

---

<sup>46</sup>Fandy Tjiptono, *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 148

sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut.

Menurut Verhange, kegiatan partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian wewenang, tanggung jawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki masyarakat mengenai:<sup>47</sup>

1. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki
2. Kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
3. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangsi yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Konsep partisipasi menurut Mardikanto adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Bomby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.<sup>48</sup>

Soetrisno menjelaskan terdapat dua jenis defenisi partisipasi yang beredar dimasyarakat. Defenisi pertama adalah defenisi yang diberikan oleh kalangan aparat perencana pembangunan formal di Indonesia, yang mendefenisikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung

---

<sup>47</sup>Aprillia Theresia, Krisnha dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung: Alfabeth,2015). h.197

<sup>48</sup>Mardikanto. *Cooperate Social Responsibility Tanggung Jawab Social Koorporas*, (Bandung: Alfabeth, 2014), Hal. 56



secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.

Defenisi kedua adalah defenisi yang ada dan berlaku universal, yaitu partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerja sama yang erat antara perencanaan dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.<sup>49</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu atau masyarakat baik secara fisik, material maupun non fisik untuk mengambil bagian dalam sebuah kegiatan atau perkumpulan baik secara bebas maupun sukarela, spontan dengan pemahaman sendiri.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 41 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>50</sup>

Bentuk partisipasi yang ditunjukkan masyarakat, juga berkaitan dengan kemauan politik penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Hobley mengemukakan partisipasi dalam tujuh jenis yaitu:<sup>51</sup>

1. Partisipasi pasif, informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran.
2. Partisipasi informatif, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan mempengaruhi.
3. Partisipasi Masyarakat dengan cara berkonsultasi

---

<sup>49</sup>Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hal. 38

<sup>50</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>51</sup>Aprillia Theresia, Krishna dkk.. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 205-206

4. Konsultatif, tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama
5. Partisipasi fungsional, masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek
6. Partisipasi interaktif, masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan
7. *Zelf mobilization* (Mandiri), masyarakat memegang kendali pemanfaatan sumber daya yang ada.

Menurut Raharjo, partisipasi dibedakan berdasarkan derajat kesukarelaannya, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Partisipasi spontan, yaitu partisipasi yang terbentuk dan tumbuh karena motivasi *intrinsic* berupa pemahaman, penghayatan, atau keyakinan sendiri tanpa adanya pengaruh yang diterimanya dari bujukan yang dilakukan oleh pihak lain (baik individu maupun lembaga masyarakat).
2. Partisipasi terinduksi, yaitu partisipasi yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi *ekstrinsic*, (berupa bujukan, pengaruh, dorongan, penyuluhan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. Motivasi ekstrinsik tersebut bisa berasal dari pemerintah, lembaga masyarakat, maupun lembaga sosial setempat atau individu.
3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu partisipasi yang tumbuh karena tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya masyarakat pada umumnya.

---

<sup>52</sup>Aprilia Theresia, et.al. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 200

4. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu partisipasi yang dilakukan karena ketakutan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
5. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan.

Keuntungan lain dari partisipasi adalah meningkatkan kemampuan dalam pengertian meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan, meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka mampu mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan proyek pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek.<sup>53</sup>

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat, ada empat bentuk partisipasi masyarakat dalam perannya, yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program pembangunan di wilayah setempat.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan

Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perlu adanya pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga/masyarakat.

---

<sup>53</sup>Lin Herlina, "Partisipasi sebagai salah satu Determinan dalam Pembangunan Desa". *Tesis*. Institut Teknologi Bandung, 2003, h. 23

### 3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

### 4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil pembangunan, misalnya: memanfaatkan jembatan penyeberangan jalan, dan sebagainya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.<sup>54</sup>

Menurut Santosa dan Heroepoetri, manfaat adanya partisipasi dalam masyarakat adalah:<sup>55</sup>

1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab
2. Meningkatkan proses belajar
3. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana Pemerintah.
4. Menciptakan kesadaran politik

---

<sup>54</sup>Jakob Oetomo, *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Gamedia Pustaka Utama 1984), h. 117

<sup>55</sup>Santoso A dan Heroepoetri A, *Peran Serta Masyarakat dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Hukum dan Demokras*”, (Bandung: PT Alumni, 2005), h. 2

5. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
6. Menjadi sumber dari informasi yang berguna.

Mardikanto menjelaskan bahwa untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela bukan karena paksaan atau ancaman.
2. Meningkatkan masyarakat agar mampu (fisik, mental, intelegensia, ekonomis, dan non ekonomis).
3. Menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain :

- Mahyudin/2018, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Kareng Kec, Manjuh Kab, Gowah”, Metode yang digunakan, Analisis deskriptif kualitatif skala likert, Hasil Penelitian, Tingkat Partisipasi masyarakat pembangunan desa di Desa Tanah Kareng di lihat mencapai skor 58,6 persen, sedangkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara” Menyatakan Masyarakat merasa tidak puas dengan pembangunan disana, ini dapat dilihat dari 58% merasa tidak puas.
- Hendryk/2013, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda” Metode yang digunakan, Analisis Deskriptif Kualitatif, dengan hasil

---

<sup>56</sup>Totok Mardikanto *Cooperate Social Responsibility*,( Bandung : Alfabeta, 2010), h. 11

Partisipasi Masyarakat pada pembangunan fisik dan non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Sedangkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara” Menyatakan tingkat partisipasi masyarakat Desa Air Hitam terhadap Pembangunan Infrastruktur desa sudah dikatakan baik dan membantu proses pembangunan infrastruktur desa dengan bergotong royong.

- Doni Edwin Siregar/2012, “Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan di Lingkungan Dwi kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Tahun 2012” Metode yang digunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, dengan hasil evaluasi tingkat kepuasan diperoleh hasil 3,03, sehingga tingkat kepuasan terhadap pembangunan jalan dikelurahan dwikora secara umum dikatagorikan baik. Sedangkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara” Pada umumnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam secara umum masih rendah.
- Atika Dzulkhijiana/2015 “Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Banyu biru Kabupaten Semarang” Metode yang digunakan Analisis Statistik Deskriptif, dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sebelum dan sesudah program PPIP dinilai bagus yaitu terhadap perkembangan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup. Sedangkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang menjadi faktor penghambat tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Air Hitam yaitu

rendahnya sumber daya manusia dalam memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam acuan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana dalam penyajiannya tidak menggunakan angka – angka melainkan dalam bentuk kalimat, kata, skema, gambar dan sebagainya sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>57</sup> Selain itu disebutkan pula bahwa penelitian kualitatif biasanya berbentuk deskriptif dan umumnya memakai analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar serta data yang dihimpun ialah bersifat kualitatif.<sup>58</sup>

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Air Htam merupakan Desa terluas dari Desa lainnya. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan selesai.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya.<sup>59</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh formal yang menjadi informan penelitian yaitu Pemerintah Desa atau Kepala Desa dan Jajarannya, serta Masyarakat Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

---

<sup>57</sup>Budi Trianto. *Riset Modeling: Teori, Konsep dan Prosedur Melakukan Penelitian*. (Pekanbaru: Adh-Dhuha Institute, 2016), h.5

<sup>58</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press 2011), h. 19

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 60





#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>60</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berikut:

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian untuk mengetahui obyektivitas dari kenyataan yang ada dilapangan seperti berbagai aktivitas masyarakat dalam pembangunan desa. Observasi dalam penelitian ini termasuk observasi non partisipan, maksudnya peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan tetapi mengamati secara langsung bagaimana tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kabupaten Batu Bara.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Hal ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada informan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan seseorang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Peneliti melakukan tanya jawab mengenai tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kabupaten Batu Bara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk mrngumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk bahan-bahan tetulis berupa laporan-laporan dari instansi-instansi pemerintah yang terkait seperti data

---

<sup>60</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 16

jumlah penduduk desa. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data fakta berupa gambar atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini guna penyusunan laporan penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses atau upaya pengolahan data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah di mengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>61</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa teknis analisis data, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses merangkum, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, memilih hal-hal yang pokok dan membuang data yang tidak perlu yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan.

##### 2. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Dan dalam penulisan ini peneliti lebih memfokuskan penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

##### 3. Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan pada tahap ini masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

---

<sup>61</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 428.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Air Hitam Batu Bara**

Pada tahun 1956 Desa Air Hitam masih merupakan kampung yang berada di areal pemerintahan Kesultanan (Datuk) untuk memimpin Desa Air Hitam maka diangkatlah Bangsawan Melayu yang bergelar di OK pada masa itu.

Lalu pada masa tahun 1972 diangkatlah juga OK MUSIP untuk menjadi Kepala Desa selama II periode sampai habis masa jabatannya pada tahun 1984. Seiring dengan perkembangan Jaman dan Informasi dan Kesadaran Masyarakat tentang Demokrasi, maka pada tahun 1985 diadakan pesta Demokrasi yang pertama kali di Desa Air Hitam, karena sarana dan pengetahuan pada masa itu masih terbatas. Maka sistem pemilihan dilaksanakan dengan sistem “Perhitungan suara dengan menggunakan lidi” dan terpilihlah Bapak Mahmudin. AM Pada tahun 2013, Bapak Alpian sebagai kepala Desa Air Hitam sampai saat ini.

#### **1. Demografi**

Desa Air Hitam dengan luas wilayah  $\pm 1620$  Ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. Batas Wilayah dan kondisi umum Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Barung-Barung
Sebelah Selatan	: Desa Selatan
Sebelah Timur	: Desa Padang Genting/Dahari selebar
Sebelah Barat	: Desa Pulau Sejuk
Topografi	: Bentang wilayah berombak sampai berbukit
Curah hujan	: 134,00 mm

Jumlah bulan hujan : 5 Bulan

Suhu rata-rata harian : 27°C

Tinggi tempat : 10 mdpl

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Desa Air Hitam**

<b>Wilayah</b>	<b>Luas Wilayah (Ha)</b>
Tanah Sawah	795 Ha
Perkebunan Kelapa Sawit	400 Ha
Perkuburan	1 Ha
Pemukiman	400 Ha
Luas Jalan Keseluruhan	2 Ha

*Sumber: Profil Desa Air Hitam, 2015*

## **2. Kependudukan**

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi adalah 3.969 Jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki – laki berjumlah 1.991 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 1.978 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Dusun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	Laki – Laki	1.991
2	Perempuan	1.978
<b>Jumlah</b>		<b>3.969</b>

*Sumber: Buku Administrasi Desa Air Hitam, 2015*

*Sumber: Profil Desa Air Hitam, 2019*

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun**

No	Dusun	Jumlah Penduduk		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun I	693	765	1.418
2	Dusun II	510	621	1.027
3	Dusun III	269	512	781
4	Dusun VI	324	354	678
5	Dusun VII	187	175	362
<b>Jumlah</b>		<b>1.983</b>	<b>2.427</b>	<b>4.410</b>

*Sumber: Profil Desa Air Hitam, 2019*

B

Berdasarkan tabel – tabel di atas, menggambarkan bahwa Desa Air Hitam memiliki jumlah penduduk yang terus mengalami pertumbuhan. Terjadi peningkatan jumlah masyarakat di Desa Air Hitam dari tahun ke tahun yang terus mengalami pertumbuhan sehingga jumlah penduduknya turut bertambah. Dengan jumlah penduduk Dusun I sebanyak 1.418, Dusun II 1.027, Dusun III 781, Dusun VI 678, dan Dusun VII 362. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Desa Air Hitam maka semakin bermacam pula tingkat partisipasi masyarakat, utamanya dalam hal pembangunan.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Ling./ Dusun	Islam	Kristen Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Kong fuszei	Jlh
1	Dusun I	1.418	-	-	-	-	-	1.418
2	Dusun II	1.027	-	-	-	-	-	1.027
3	Dusun III	781	-	-	-	-	-	781
4	Dusun VI	100	500	78	-	-	-	678
5	Dusun VII	362	-	-	-	-	-	362
<b>Jumlah</b>		<b>3.688</b>	<b>500</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.266</b>

*Sumber: Profil Desa Air Hitam, 2019*

Dari tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa penduduk Desa Air Hitam bermayoritas Islam dengan jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 3.688 jiwa, Kristen 500 jiwa, dan Katholik 78. Khusus untuk Desa Air Hitam terdapat 3 Kelompok Majelis Taklim, serta 6 kelompok yasinan untuk setiap malam jum'at.

**Tabel 4.5**  
**Sarana Tempat Ibadah Desa Air Hitam**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	6
3	Gereja	3
<b>Total</b>		<b>7</b>

*Sumber: Profil Desa Air Hitam*

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sarana tempat ibadah yang ada di Desa Air Hitam, paling banyak yaitu masjid 3 buah, 6 musholla dan 3 gereja. Tujuh infrastruktur ibadah tersebut telah dibangun dengan solidaritas gotong royong antar masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya rasa gotong royong yang tercipta dan terpelihara ditengah masyarakat. Akan tetapi dengan banyaknya masyarakat yang beragama Islam, terdapat keinginan di tengah masyarakat yakni adanya pembangunan masjid lainnya yang berada di Desa Air Hitam. Hal tersebut menjadi harapan besar masyarakat mengingat hanya terdapat 3 masjid saja yang berada di desa.

### **3. Mata Pencaharian Pokok**

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Air Hitam dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS/TNI, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Di Desa Air Hitam jumlah penduduk yang bermata pencaharian dan kehidupannya bergantung pada sektor pertanian ada sekitar 51,59 %. Dan sekitar 47,26 % bekerja sebagai petani.

**Tabel 4.6**  
**Mata Pencaharian Penduduk**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	950	47,26 %
2	Buruh Tani	700	23,96 %
3	PNS/TNI/POLRI	20	0,50 %
4	Karyawan Swasta	-	-

*Sumber: Profil Desa Air Hitam*

#### **4. Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru.

Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukuan lapangan kerja baru guna mengarasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Berikut data yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Air Hitam:

**Tabel 4.7**  
**Pendidikan Masyarakat Desa Air Hitam**

Pendidikan	Jumlah
Belum Sekolah	312 orang
Usia 7 - tahun tidak pernah sekolah	78 orang
Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	600 orang
Tamat SD / sederajat	1350 orang
Tamat SLTP / sederajat	400 orang

Tamat SMA / sederajat	350 orang
Tamat D1	1 orang
Tamat D2	0 orang
Tamat D3	75 orang
Tamat S1	100 orang
Tamat S2	10 orang

*Sumber: Profil Desa Air Hitam*

## 5. Pemerintahan

### a. Visi dan Misi

#### 1) Visi

Apatur Desa Air Hitam dan masyarakat setempat sepakat bahwa visi adalah gambaran umum dari kondisi yang ideal yang dibutuhkan oleh Desa Air Hitam di masa yang akan datang yang dicapai bersama dengan partisipasi masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa, yaitu 6 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Adapun sesuai kesepakatan antara Pemerintah Desa Air Hitam dengan BPD Desa Air Hitam bahwa visi Desa Air Hitam adalah:

*“Terselenggarakannya Tata Pemerintahan Desa yang baik, menuju masyarakat yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera”.*

#### 2) Misi

- a) Meningkatkan kondisi masyarakat desa yang aman, tertib, rukun saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegangan teguh pada prinsip – prinsip agama dan budaya yang ada.



- b) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kualitas dan kuantitas remaja masjid untuk kemakmuran dan tempat – tempat ibadah.
- c) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan mewujudkan dan membantu memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat Desa Air Hitam.
- d) Memberikan intensif atau tunjangan pada Guru ngaji/Sekolah minggu. Bilal Mayit, Penggali Kubur dan Nadzir Masjid.
- e) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mempengaruhi mutu dan efektivitas pembelajaran di PAUD PKK Desa Air Hitam.

**b. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, dan orang-orang yang mewujudkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur ini mengandung unsur sentralisasi kerja atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan kerja.

Kepala Desa : 1 Orang

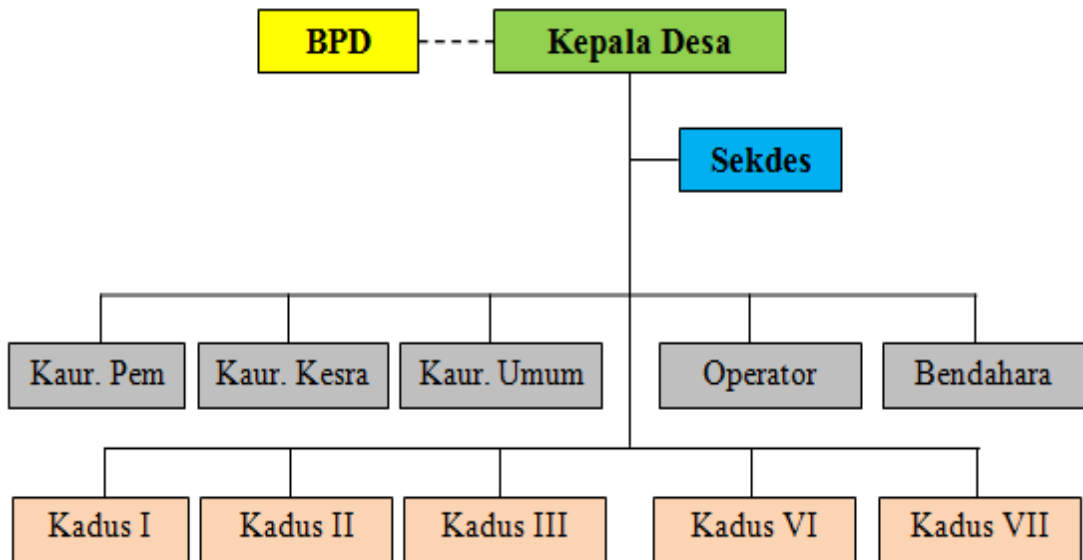
Perangkat Desa:

Sekretaris Desa : 1 Orang

Kepala Urusan : 3 Orang

Kepala Dusun : 5 Orang

## Pemerintahan Desa Air Hitam



(Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan  
Desa Air Hitam Batu Bara)

**Tabel 4.8**  
**Pemerintahan Desa Air Hitam**

No.	Nama	Jabatan
1	ALPIAN	Kepala Desa
2	RENI MARTI SINAGA	Sekretaris Desa
3	AMIRUDDIN	Kepala Urusan Pemerintahan
4	ELVIRA	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
5	SUSANTI RIANI	Kepala Urusan Umum
6	ABDUL SALIM	Kepala Dusun I
7	ULUL AZMI	Kepala Dusun II
8	MHD TOYIB	Kepala Dusun III
9	EDISON BUTAR BUTAR	Kepala Dusun VI
10	RAMLI	Kepala Dusun VII

*Sumber: Buku Administrasi Desa Air Hitam, 2015*

## **6. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

### **a. Bidang Infrastruktur/ Sarana Prasarana**

- 1) Badan Jalan poros desa banyak yang rusak
- 2) Badan Jalan Dusun sering erosi pada musim hujan
- 3) Sarana penghubung antar dusun tidak memadai
- 4) Rumah warga banjir pada musim hujan
- 5) Saluran pembuangan air kurang memadai
- 6) Sarana air bersih kurang
- 7) Tapal batas desa tidak ada

### **b. Bidang Ekonomi**

- 1) Hasil Panen kurang memuaskan karena kualitas padi yang kurang
- 2) Produksi menurun karena kurangnya pupuk bersubsidi
- 3) Belum ada Badan Usaha Milik Desa
- 4) Pedagang belum terorganisir dengan baik
- 5) Kurang modal usaha
- 6) Transportasi ke lahan pertanian kurang memadai

### **c. Bidang Sosial Budaya**

- 1) Kelompok tani sangat perlu pembinaan
- 2) Anak –anak usia remaja kurang kreatifitas
- 3) Petugas posyandu sering mengeluh masalah pendanaan
- 4) Masih banyak pengangguran
- 5) Banyak remaja terkontaminasi narkoba
- 6) Pada musim hujan sering muncul penyakit diare dan demam
- 7) Kesadaran pola hidup sehat masih kurang

## **7. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa**

- a. Pendapatan desa bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Pajak yaitu PBB dipungut oleh Colector PBB bekerja sama dengan Kepala Dusun dalam hal ini kolektor turun secara bergiliran ke tiap dusun dengan pemberitahuan terlebih dahulu dan selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan pengutipan, kepala dusun melakukan pengutipan langsung ke rumah wajib pajak dan menyetorkan hasilnya kepada kolektor setiap bulannya secara berkesinambungan
- c. Pendapatan dari pungutas desa dan dari pemerintah dikelola oleh Bendahara

## **8. Kebijakan Umum Anggaran**

Pemerintah desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas anggaran uang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun tahun sebelumnya yang kemudia di tuangkan dalam APBDes dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes APBDesa).

## **B. Pembahasan**

### **1. Pembangunan Infrastruktur Desa**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa (*goods and service*). Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur desa.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan program yang dinilai memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan desa yang sampai saat ini masih terus dilakukan dan secara terus menerus dilakukan perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa sehingga dapat memecahkan masalah yang terjadi.

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat Desa Air Hitam Batu Bara. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Pemerintah Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sampai saat ini terus memaksimalkan pembangunannya, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai.

Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Air Hitam adalah di bidang infrastruktur terutama perbaikan jalan, parit dan irigasi yang masih menjadi permasalahan pada Desa Air Hitam. Serta jembatan yang berfungsi sebagai sarana penghubung antar dusun juga perlu diperhatikan karena akan dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama masyarakat desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Usman selaku BPD Desa Air Hitam:

*"Untuk pembangunan, kalau dari infrastruktur fisik seperti gedung itu cukup baik, namun ada beberapa yang belum memadai seperti ambulance desa, poskamling yang belum terbangun di 4 dusun sehingga keamanan desa masih dikhawatirkan. Juga belum adanya BUMdes dan sarana olahraga masyarakat. Namun saat ini yang menjadi perhatian bagi kami*

*saat ini adalah pembangunan jalan, irigasi, parit dan jembatan yang merupakan jalur transportasi masyarakat sehari - hari untuk menjalankan aktifitasnya.”<sup>62</sup>*

Kebutuhan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur jalan merupakan masalah utama masyarakat di Desa Air Hitam, seperti diungkapkan Ibu Salma yang merupakan masyarakat desa:

*“Kalau pembangunan yang paling di butuhkan di desa ini itu pasti jalan, karena sebagian besar jalan disinikan sangat rusak, juga masih banyak jalan yang berupa tanah, itu menyulitkan kami untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kadang motor yang kami gunakan untuk mengangkut padi terjebak di jalanan tanah yang lubang dan berpasir”<sup>63</sup>*

Berdasarkan observasi, sebagian kondisi jalan yang seluruhnya telah dilapis mengalami kerusakan parah dan perlu di beton atau di aspal, juga ada sebagian jalan desa masih dalam proses pengerasan jalan, dan jalan dengan kondisi masih berupa tanah dan pasir kerikil. Kondisi ini sering kali membuat masyarakat dalam kesulitan, jalan yang masih berupa tanah dan bebatuan sering kali membuat masyarakat pengendara roda dua terjatuh dan kadang membuat kendaraannya tergelincir, belum lagi kondisi jalan yang kecil membuat kendaraan roda empat sulit melewatinya karena jalan yang sempit ini membuat mobil tidak dapat bertemu.

Pemerintah Desa Air Hitam memiliki beberapa program pada bidang pembangunan infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan pembangunan infrastruktur Desa dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang bermutu, mudah dan murah dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat, seperti:

- a. Pembangunan sarana penghubung antar dusun serta jalan pendukung roda perekonomian masyarakat yang meliputi pembangunan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana

---

<sup>62</sup>Bapak Usman, Hasil Wawancara Pribadi, Kepala Desa Air Hitam, (Batubara, 25 September 2019 Pukul 09.00 WIB)

<sup>63</sup>Ibu Salma, Hasil Wawancara Pribadi, Masyarakat Desa, (Batubara, 25 September 2019 Pukul 15.00 WIB)

lainnya terutama pada wilayah yang berpotensi menggerakkan perekonomian Desa.

- b. Perbaikan jalan pada titik - titik pengembangan pertanian, perkebunan dan usaha produktif lainnya.
- c. Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi dan air bersih.

Seiring dengan dinamika dan permasalahan yang sering muncul dan berkembang dalam masyarakat dengan begitu cepat menuntut pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk lebih mempersiapkan pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Seperti Kepala Desa Air Hitam juga menjelaskan:

*“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk perbaikan kualitas pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dengan menjalankan program-program pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, misalnya saat ini kami fokuskan pada kebutuhan utama masyarakat yakni jalan lintas”*.<sup>64</sup>

Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertaniannya agar lebih mudah dan sebagainya.

Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan di desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan Desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan desa itu sendiri.

---

<sup>64</sup>Bapak Alpian, Hasil Wawancara Pribadi, Kepala Desa Air Hitam, (Batubara, 25 September 2019 Pukul 11.00 WIB)

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya dan bagaimana tingkat kepuasan dari masyarakat itu sendiri terhadap infrastruktur desa. Baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dalam tahap perencanaan pembangunan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat, oleh sebab itu, tanggung jawab dalam berhasil atau tidaknya pembangunan tidak saja berada pada tangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, maka diperlukan partisipasi setiap bagian dari desa dan perlunya respon kepuasan dari masyarakat terhadap pembangunan desa.

Pembangunan infrastruktur perdesaan dilakukan dengan cara memperbaiki akses mobilisasi warga, melalui pembangunan dan pembetonan jalan di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara serta fasilitas lainnya. Pembangunan infrastruktur ini diarahkan untuk melestarikan semangat gotong-royong dan meningkatkan kerjasama antar warga, menciptakan masyarakat yang peduli dengan lingkungan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan lokal.

Seluruh proses pembangunan jalan ini dilakukan dengan basis partisipasi masyarakat, yakni masyarakat yang berperan langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan menikmati manfaat berbagai pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah Masyarakat mengidentifikasi kebutuhan, mengurus perizinan yang diperlukan dan secara bersama-sama merawat keberlangsungan manfaat infrastruktur ini.



## **2. Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara**

Dalam hal perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan adalah perbaikan pada infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam terfokus pada pembuatan jalan baru. Pembuatan jalan baru adalah salah satu upaya pemerintah setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pekerjaannya. Akan tetapi kurangnya kepuasan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan itu sendiri mengakibatkan proses pembangunan menjadi lamban dan kebijakan pembangunan belum terwujud dengan baik.

Sehubungan dengan adanya Pembangunan Infrastruktur Desa, berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap manfaat pembangunan tersebut. Tingkat kepuasan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara secara umum masih belum mendapat respon yang baik dari masyarakat desa.

Hal tersebut ditunjukkan dengan jawaban masyarakat yang sebagian besar menyatakan bahwa proses pembangunan infrastruktur Desa Air Hitam dilaksanakan dengan kurang baik dan terkesan lambat. Seperti sarana air bersih yang sulit didapatkan karena saluran pembuangan air rumah tangga maupun pertanian mengalami kemacetan atau tidak lancar. Parit di sepanjang jalan juga belum di bangun atau di beton sehingga badan jalan terjadi erosi dan rumah warga desa tergenang ketika air hujan turun.

Jalan lintas antar dusun dan akses jalan menuju lahan pertanian dan perkebunan pun belum di perbaiki dengan baik, masih banyak jalan yang belum di lapis dan proses pengaspalan jalan belum merata sehingga sarana

penghubung antar dusun sulit untuk diakses. Dan transportasi masyarakat menuju lahan pertanian juga kurang.

Berdasarkan hasil observasi, penyebab masyarakat belum merasa puas terhadap pembangunan infrastruktur desa adalah masyarakat merasa bahwa kualitas kinerja pemerintahan Desa Air Hitam dinilai belum maksimal dan manfaat yang didapat masyarakat belum merata. Sehingga pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya masih mendapat kritik ketidakpuasan dari masyarakat.

Hal tersebut mendapat perhatian dari Bapak Idham Khalif selaku tokoh masyarakat Desa Air Hitam yang mengatakan:

*“Pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Air Hitam mulai dari sarana dan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya masih kurang karena pasalnya untuk pembuatan jalan sudah hampir sepuluh tahun ini hanya itu-itulah saja yang diperbaiki dan tidak meratanya pembangunan fasilitas desa yang ada di setiap dusun”*.<sup>65</sup>

Kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi publik yang dipersepsikan sebelumnya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan masyarakat bisa mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan yang umum. Jika kinerja di bawah harapan, masyarakat akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan, masyarakat akan puas.

Apabila kinerja melampaui harapan, masyarakat akan sangat puas, senang, atau bahagia. Instansi pemerintah desa harus bisa memberikan rasa puas kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak puas oleh pelayanan pemerintah, maka akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah sehingga perbaikan dan proses pelaksanaan pembangunan akan sulit untuk diwujudkan.

---

<sup>65</sup>Bapak Idham Khalif, Hasil Wawancara Pribadi, Tokoh Masyarakat Desa, (Batubara, 25 September 2019 Pukul 17.15 WIB)

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang dapat dijadikan indikator dalam dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan
- b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya
- c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya)
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan
- f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat
- g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan

---

<sup>66</sup>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani
- i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati
- j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan
- k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan
- l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan
- n. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Air Hitam disusun agar memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi instansi pemerintah desa itu sendiri. Pemerintah desa harus berupaya agar masyarakat akan merasa puas bila hasil pembangunan infrastruktur yang menunjukkan bahwa produk/jasa yang mereka gunakan berkualitas.

Menurut Ibu Herlina selaku ibu rumah tangga di Desa Air Hitam juga berpendapat tentang:

*“Saya melihat hanya dari sudut pandang sebagai masyarakat awam saja, yang dirasakan dari pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam ini sudah cukup baik, tetapi kondisi tentang kurang meratanya pembangunan*

*fasilitas yang ada di desa air hitam ini memang benar. Ada perbedaan fasilitas di setiap dusun, seperti jalan di Dusun VII ini masih jelek, berbeda dengan Dusun I yang sudah jauh lebih bagus”*.<sup>67</sup>

Perbaikan dan peningkatan infrastruktur desa pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang, dapat terdistribusikan sumber daya alam khususnya perkebunan kelapa sawit dan perbaikan kualitas dari jasa-jasa angkutan tersebut.

Pemerintah desa harus berupaya agar kualitas pembangunan dapat memenuhi persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, sistem dan prosedur, mekanisme, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana.

### **3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara**

Pembangunan perdesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah, di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata pada pihak seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.

---

<sup>67</sup>Ibu Herlina, Hasil Wawancara Pribadi, Masyarakat Umum Desa, (Batubara, 27 September 2019 Pukul 11.00 WIB)

Alasan utama pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan yaitu: Pertama, sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan; Kedua, sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat; Ketiga, masyarakat memperoleh hak untuk berkontribusi dalam menentukan program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya. Sehingga pemerintah desa dapat mengelola segala urusan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), administratif dan pengelolaan keuangan yang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat, ada empat bentuk partisipasi masyarakat, yaitu Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, Partisipasi Pelaksanaan Pembangunan, Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan, Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan.

Secara umum, masyarakat Desa Air Hitam sudah melaksanakan poin partisipasi tersebut, namun terkadang tingkat partisipasinya masih dikatakan belum maksimal. Tingkat partisipasi masyarakat pada umumnya dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang dengan sadar dan suka rela turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk mulai dari pembangunan hingga keikutsertaan dalam berbagai hal yang ada di Desa.

Bentuk partisipasi masyarakat merujuk pada wujud kontribusi masyarakat dalam keikutsertaannya. Wujud kontribusi dari partisipasi masyarakat sudah barang tentu tergantung pada tahapan proses pelaksanaan program, karena wujud kontribusi tersebut akan berbeda pada setiap tahapan. Dalam penyusunan perencanaan masyarakat Desa Air Hitam kila bisa berperan dan ikut serta dalam penyusunannya. Adapun wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Air Hitam:

*“Dalam perencanaan pembangunan, masyarakat seharusnya turut aktif dalam memberikan partisipasi baik berupa ide, gagasan maupun kritik atau masukan. Hal itu dapat dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Musyawarahnya dimulai dari musyawarah dusun untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun, kemudian berlanjut ke musyawarah Desa untuk menyusun rencana pembangunan, dan terakhir untuk membahas rancangan serta menyepakatinya”.*

Perencanaan pembangunan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dimana masyarakat berharap dengan perbaikan infrastruktur jalan dapat memudahkan mereka, untuk melakukan aktifitasnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Arto selaku masyarakat desa:

*“Kebutuhan utama di desa ini sudah pasti jalan, kondisi jalan yang sekarang sangat menghambat untuk melakukan aktifitas, apalagi saat musim hujan itu sangat sulit membawa kendaraan karena takut licin dan terjebak di lumpur, jadi kami terpaksa jalan kaki sampai jalan utama”.*

Sebagai pemerintah desa, Pemerintah harus jeli dan cepat dalam menanggapi segala permasalahan yang ada terutama masalah yang menyangkut tentang kepentingan orang banyak, karena fasilitas jalan merupakan salah satu instrumen penting yang harus dipenuhi guna menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan.

Selain partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan, bentuk lain dari sumbangsih masyarakat juga bisa berupa tenaga fisik seperti gotong royong dan kerjasama antar masyarakat. Jumlah masyarakat yang ikut dalam kegiatan gotong royong di Desa Air Hitam dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Laporan Kegiatan Rutinitas Gotong Royong Masyarakat**  
**Desa Air Hitam Batu Bara**

No	Lokasi Gotong Royong	Orang Tua	Remaja Dewasa	Anak Remaja	Jumlah Orang Tua Yang Ikut Serta	Jumlah Remaja Dewasa Yang Ikut Serta	Jumlah Anak Remaja Yang Ikut Serta	Jumlah Keseluruhan Peserta Gotong Royong	Nilai Upah Kerja Peserta Gotong Royong
		(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	
1	Dusun I	24	40	70	20	20	10	50	Relawan
2	Dusun II	22	35	50	15	20	8	43	Relawan
3	Dusun III	15	30	30	10	22	10	42	Relawan
4	Dusun VI	25	40	60	15	26	15	56	Relawan
5	Dusun VII	10	20	30	8	17	15	40	Relawan

(Sumber: Laporan Desa Air Hitam, 2019)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam gotong royong dalam proses pembangunan sudah baik walau masih terbilang tidak begitu banyak jumlah masyarakat tiap dusunnya. Tetapi bisa dikatakan bahwa kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat Desa Air Hitam dalam proses pembangunan infrastruktur perlahan sudah mulai mengalami perubahan.



Partisipasi masyarakat dikatakan sudah baik karena masyarakat pada awalnya turut bergotong – royong membersihkan lahan yang akan digunakan, serta pembuatan jalan baru tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam bentuk partisipasinya salah satunya dapat ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam bentuk evaluasi/pengawasan dalam pembangunan dan memberikan hasil pengawasan tersebut kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab selanjutnya.

Dalam hal ini, pembuatan jalan baru merupakan program yang diusulkan oleh masyarakat Desa Air Hitam. Hal penting yang perlu di perhatikan adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program Desa. Karena keikutsertaan masyarakat ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat.

Bapak Alpian selaku Kepala Desa Air Hitam mengatakan:

*“Pembangunan yang ada di Desa Air Hitam sebagian besar adalah hasil musyawarah yang telah dilaksanakan bersama masyarakat. Secara tidak langsung ide dan gagasan pembangunan awalnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat desa, jadi mereka memang sudah turut berpartisipasi walaupun partisipasinya memang masih dikatakan kurang.”<sup>68</sup>*

Namun, ada beberapa program yang belum terlealisasikan dengan baik. Hal yang menjadi pertimbangan terdapat beberapa program usulan yang tidak dapat dilaksanakan karena dianggap masih banyak yang jauh dari kebutuhan masyarakat desa dan pelaksanaan yang belum sesuai dengan kondisi dana desa.

Bapak Alpian melanjutkan:

*“Sudah terjadi beberapa kali pembangunan di Desa Air Hitam ini seperti pembuatan jalan baru, pembuatan parit, pengerasan jalan dan pembangunan masjid yang melibatkan masyarakat desa, namun masih banyak kendala dikarenakan luasnya desa dan dana yang belum teralokasikan”.*

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai, sebab pelaksanaan pembangunan harus mengkondisikan Dana yang tersedia. Pengelolaan program-program

---

<sup>68</sup>Bapak Alpian, Hasil Wawancara Pribadi, Kepala Desa Air Hitam, (Batubara, 26 September 2019 Pukul 10.00 WIB)

pembangunan desa tidak hanya mengandalkan kepuasan dan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintah desa. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa Air Hitam:

*"Pemerintah desa tidak akan mampu membiayai seluruh program-program pembangunan desa, pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi harus tersedia dana yang cukup agar pembangunannya bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien".*<sup>69</sup>

Terkait dalam proses perencanaan pembangunan tekhusus pada pembuatan jalan baru, terjadi penolakan di tengah masyarakat Desa Air Hitam. Padahal infrastruktur dalam hal ini merupakan akses yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi pihak Pemerintah Desa beserta jajarannya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kepuasan didalam pembangunan utamanya infrastruktur jalan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam masalah pembangunan. Cara yang dilakukan salah satunya yaitu dengan menyampaikan kepada masyarakat apabila ada yang ingin berkontribusi dalam hal pembiayaan untuk pembangunan Desa Air Hitam. Terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk materi/dana.

Keterlibatan masyarakat Desa Air Hitam dalam bentuk sumbangan uang adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan.

Bapak Alpian juga menambahkan:

*"Dalam pembangunan juga kami biasanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat khususnya Desa Air Hitam yang ingin berpartisipasi untuk pembangunan dapat membantu dalam bentuk uang, dalam bentuk swadaya masyarakat. Namun kami tidak memaksakan, hal ini karena kami tidak bisa mengharap sepenuhnya terhadap dana yang ada dari kabupaten."*

---

<sup>69</sup>Ibu Reni Marti Sinaga, Hasil Wawancara Pribadi, Kepala Desa Air Hitam, (Batubara, 26 September 2019 Pukul 10.00 WIB)

Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, maka semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Walaupun dalam perencanaan dan pelaksanaannya ada sebagian masyarakat yang menolak karena permasalahan lahan yang akan di gunakan untuk pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan yang masih terjadi sampai saat ini adalah masalah tentang kurangnya lahan atau pembebasan lahan yang menyebabkan kegagalan dalam pembangunan. Masyarakat desa menginginkan agar tanah mereka yang digunakan untuk pembangunan tersebut dapat memberikan keuntungan berupa ganti rugi berupa uang atau kompensasi. Sehingga sebagian masyarakat menolak dilakukannya pembangunan jalan tersebut.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Jumiran selaku PJS Desa Air Hitam:

*“Untuk masalah pembuatan jalan baru tersebut memang pada awalnya sebagian masyarakat menolak dilakukan pembangunan tersebut karena mereka menginginkan adanya penggantian berupa materi atau uang. Akan tetapi kami beserta seluruh jajaran desa terus berupaya bagaimana memberikan pemahaman mendasar bagi masyarakat mengingat pembuatan jalan baru tersebut untuk kepentingan dan kelancaran masyarakat itu sendiri.”<sup>70</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur khususnya pada pembuatan jalan baru pada awalnya memang tidak begitu baik. Terjadi penolakan ditengah masyarakat desa atas kepemilikan lahan tersebut yang ingin diberikan penggantian berupa uang. Hal tersebut tentunya turut menjadi perhatian khusus utamanya oleh Bapak Kepala Desa Air Hitam dalam memberikan pemahaman bagi sejumlah masyarakat yang terkait.

Munculnya proses partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendasarkan atas dua pendekatan. Pertama, pelibatan masyarakat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga dengan

---

<sup>70</sup>Bapak Jumiran, Hasil Wawancara Pribadi, PJS Desa Air Hitam, (Batubara, 26 September 2019 Pukul 17.00 WIB)

demikian adanya jaminan pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan. Kedua, membuat umpan balik yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Pemerintah Desa Air Hitam memberikan pemahaman serta komunikasi yang cukup kepada masyarakat terkait sehingga pada akhirnya secara suka rela setuju tanah tersebut untuk pembuatan jalan baru, mengingat jalan tersebut bukan merupakan pembangunan yang besar. Pendekatan secara kekeluargaan pun turut dilakukan oleh pihak dari Desa dalam memberikan pemahaman oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga pada akhirnya tidak terjadi lagi penolakan ditengah masyarakat.

#### **4. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara**

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan di Desa Air Hitam merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan nasional, karena titik berat pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan desa. Namun demikian, peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan yaitu berupa faktor penghambat maupun faktor pendukung.

Pelaksanaan pembangunan merupakan perwujudan dari perilaku yang didorong adanya faktor utama yang mendukung, salah satunya adalah kemauan. Kemauan dari dalam masyarakat itulah yang sebenarnya mendorong seseorang untuk dapat terlibat di dalam suatu kegiatan pembangunan apalagi kegiatan pembangunan tersebut merupakan kebutuhan dan menjadi prioritas mereka sebagai masyarakat setempat. Sehingga mereka tergerak untuk terlibat didalam kegiatan pembangunan tersebut.

Berikut beberapa faktor pendukung kepuasan dan partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Batu Bara yaitu:

**a. Sumbangan dan Dukungan Masyarakat**

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam menyelenggarakan pembangunan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang dialami setiap daerah tak terkecuali Desa Air Hitam.

Dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, selain dibutuhkan adanya berupa sumbangan dana, dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah Desa turut serta diperlukan dalam pembangunan. Oleh karena itu, keseluruhan unsur tersebut terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan pembangunan itu sendiri. Bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga Negara masyarakat dapat berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain
- 4) Sumber daya masyarakat
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Adanya pembuatan jalan diharapkan salah satu alternatif masyarakat dalam mempermudah jarak tempuh atau dalam hal ini merupakan jalan pintas. Adapun bentuk sumbangan dan dukungan masyarakat Desa Air Hitam ditunjukkan berupa pembebasan lahan secara sukarela.

Seperti pernyataan dari salah satu masyarakat Desa yaitu Bapak Oka Saipul selaku pemilik lahan:

*“Memang benar lahan yang digunakan dalam pembuatan jalan baru tersebut diberikan secara suka rela. Saya pribadi sebagai pemilik lahan menganggap bahwa lahan yang digunakan tidak seberapa dengan apa hasil yang dirasakan oleh dari hasil pembangunan tersebut. Saya pribadi juga nantinya akan turut merasakan dampak dari pembuatan jalan tersebut mengingat ada juga lokasi lahan sawah saya yang apabila pembuatan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan maka akan sedikit mempermudah waktu tempuh saya. Walaupun memang perbandingan jarak tempuhnya tidak seberapa tapi akan lebih meringankan.”<sup>71</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh salah satu pemilik lahan yang digunakan dalam pembuatan jalan baru bahwa secara pribadi masyarakat tersebut dengan suka rela digunakan lahannya untuk pembangunan pada infrastruktur jalan di Desa Air Hitam. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri. Salah satu peningkatan berupa dukungan masyarakat Desa Air Hitam karena swadaya yang diberikan berupa lahan.

Walaupun lahan yang digunakan berdasarkan lahan dari masyarakat tidak begitu banyak. Disini terlihat bahwa salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif.

#### **b. Faktor Kesadaran dan Kemauan**

Keikutsertaan dalam suatu proses pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena ada yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Proses dari pembangunan di Desa tidak hanya membutuhkan tanggung jawab bersama akan tetapi dibutuhkan faktor kemauan untuk ikut langsung menyelesaikan pembangunan yang ada.

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Saipul selaku pemilik lahan di Desa Air Hitam, (Batubara, 29 September 2019 Pukul 14.00 WIB)

Dalam pembuatan jalan baru di Desa Air Hitam, kesadaran atau tingkat kemauan masyarakat setempat untuk mendukung pembangunan tersebut terbilang sudah baik. Salah satu bukti bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi yaitu dengan membebaskan lahannya. Terjadinya suatu pembangunan yang ada di Desa Air Hitam tidak terlepas dari campur tangan dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan Infrastruktur yang baik turut memicu lajunya pertumbuhan ekonomi utamanya bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai petani.

Dalam hal ini swadaya yang ada berupa tenaga. Bagi kaum pria yang memang merasa tidak mampu membantu dengan materi, mereka dengan suka rela bergotong royong membersihkan lahan yang akan digunakan untuk pembuatan jalan baru tersebut, walaupun masyarakat yang ada tidak seberapa.

Sedangkan, bagi kaum perempuan mereka disibukkan dengan menyediakan berbagai olahan masakan seperti kue dan teh hangat. Hal tersebut merupakan tingkat kemauan masyarakat dengan sukarela berpartisipasi dalam pembuatan jalan baru. Tanah tersebut awalnya hanya berupa hutan yang di kelilingi oleh sejumlah sawah masyarakat.

Hal ini lah yang juga menjadi salah satu alasan mengapa perlu dilakukan pembuatan jalan baru. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya pembuatan jalan baru seperti:

- 2) Mempermudah pengangkutan hasil bumi
- 3) Sebagai jalan pintas bagi anak sekolahan mengingat jalan tersebut merupakan jalan strategis untuk kesekolah,
- 4) Serta bagi masyarakat yang pada awalnya harus berputar sekitar 2 km untuk keladang dan sawah, kini dimudahkan dengan jalan tersebut.

Dengan adanya dampak tersebut, masyarakat sekitar merasa bahwa ada kemudahan dari akses jalan tersebut. Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur jalan akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sector-sektor ekonomi terkait, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan mobilitas barang.

Selain adanya faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam Infrastruktur di Desa Air Hitam Batu Bara. Berdasarkan observasi dan wawancara mengenai hambatan – hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

- a. **Belum optimalnya sistem**, mekanisme dan prosedur yang disebabkan oleh masih rendahnya sumber daya manusia, kurang dipahaminya SOP yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan juga minimnya sejumlah anggaran yang dimiliki pemerintah desa;
- b. **Terlambatnya waktu penyelesaian pekerjaan**, yang disebabkan oleh masih rendahnya SDM yang dimiliki pelaksana pembangunan dan juga sikap kesungguhan pelaksana yang masih rendah;
- c. **Rendahnya kompetensi pelaksana**, yang disebabkan oleh sumber daya manusia pelaksana yang masih rendah dan juga pengalaman yang masih minim sehingga sulit untuk memahami SOP yang telah ditetapkan;
- d. **Kurangnya perilaku pelaksana**, yang disebabkan oleh masih rendahnya sikap dan kemauan pelaksana untuk dapat melaksanakan pekerjaan demi kepentingan masyarakat;
- e. **Belum memadainya sarana dan prasarana**, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa untuk menyediakan fasilitas yang lengkap dan memadai.



Pemerintah sebagai penyelenggara dari pembangunan tersebut harus memusatkan subjek pembangunan berdasarkan kebutuhan oleh masyarakat Desa Air Hitam. Akan tetapi, sebagai pelaksana kegiatan tentunya mempunyai tantangan dalam proses pembangunan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Air Hitam bahwa:

*“Harus diakui bahwa masih terdapat sebagian warga desa kami yang meskipun telah diajak langsung dan telah disosialisasikan untuk ikut berpartisipasi namun mereka tetap lebih memilih untuk bekerja di ladang mereka dan ada juga yang mengatakan bahwa anggaran setiap pembangunan dari pemerintah sudah ada (dana Desa)”*.<sup>72</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa dana Desa yang awalnya diberikan demi untuk kelancaran pembangunan serta diharapkan dapat memberdayakan masyarakat Desa ternyata tidak begitu berdampak positif ditengah masyarakat Desa Air Hitam.

Terdapat sebagian dari masyarakat yang meskipun diajak langsung untuk ikut berpartisipasi namun mereka lebih memilih untuk bekerja diladang dan sawah mereka karena anggapan bahwa Pemerintah sudah mempunyai dana Desa. Jadi dalam pembuatan jalan baru tersebut awalnya sedikit terkendala karena kurangnya biaya material dan juga faktor penghambat lainnya karena ada sebagian masyarakat yang tidak ingin berkontribusi dalam bentuk swadaya tenaga maupun materi.

Selain itu, rendahnya pengetahuan dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Ait Hitam menjadi kendala bagi pencapaian program pembangunan. Pengembangan pola pikir masyarakat sangat terbatas terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, misalnya penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan, tata cara pelaksanaan pembangunan partisipatif dan lainnya, daya serap masyarakat sangat lemah sehingga hasil dari penyuluhan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal.

---

<sup>72</sup>Bapak Alpian, Hasil Wawancara Pribadi, Kepala Desa Air Hitam, (Batubara, 29 September 2019 Pukul 17.20 WIB)

Perencanaan dalam pembuatan jalan baru pada awalnya ada sebagian masyarakat yang menolak untuk membebaskan lahannya. Dengan tingkat pendidikan seseorang yang tinggi, turut mempengaruhi pemahaman seseorang utamanya dalam hal pembangunan. Selain itu penggantian dalam bentuk uang menjadi keinginan oleh masyarakat bersangkutan. Hal ini menggambarkan kurangnya pemahaman akan pentingnya pembangunan, baik secara pribadi ataupun kepentingan orang banyak.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya pendidikan, masyarakat bisa berpikir kreatif dan mampu mengikuti perubahan seperti penggunaan inovasi baru, penerapan teknologi, dan pola pikir yang berorientasi pada pembangunan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Air Hitam salah satunya berdampak pada kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat di bidang pembangunan jalan desa. Masyarakat yang tidak mampu berubah untuk mengikuti perkembangan zaman akan semakin tertinggal. Dalam keadaan seperti ini, struktur ekonomi masyarakat pedesaan akan tetap berada dalam ambang kemiskinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada umumnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara secara umum masih rendah. Masyarakat menilai bahwa masih terjadi ketimpangan antar dusun dalam pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas desa lainnya dan masyarakat juga kinerja pemerintah desa masih belum maksimal dan dinilai lamban.
2. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara terhadap pembangunan infrastruktur desa

sudah bisa dikatakan baik dan membantu proses pembangunan infrastruktur desa. Tingkat Partisipasi masyarakat terdiri atas pemberian saran/usulan, sumbangan tenaga seperti gotong royong, dana, dan material. Bahkan ada beberapa masyarakat yang berpartisipasi dengan kritik ketidakpuasan dan tidak memberikan partisipasi.

3. Faktor hambatan yang mempengaruhi tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yaitu rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai informasi pembangunan, kurang dipahaminya aturan yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan, masih rendahnya sikap kesungguhan pelaksana, pengalaman yang minim dan keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa.
4. Faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yaitu adanya sumbangan dan dukungan serta adanya kemauan/kesadaran dari

masyarakat Desa Air Hitam. Salah satu bukti bahwa adanya kesadaran dan bentuk dukungan masyarakat untuk ikut berpartisipasi yaitu kesediaan membebaskan lahannya.

## **B. Saran**

1. Partisipasi masyarakat Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dalam pembangunan infrastruktur desa perlu ditingkatkan lagi serta Pemerintah sebagai pelaksana tugas yang ada di Desa Air Hitam harus lebih mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai musyawarah Desa, terkhusus untuk musyawarah dusun.
2. Disarankan kepada masyarakat Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara agar mempertahankan terus keikutsertaan partisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur jalan desa dan diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan desa.
3. Pemerintah Desa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan dana yang sesuai untuk keperluan pembangunan, serta mengembalikan dan meningkatkan rasa kebersamaan dan dalam gotong royong masyarakat Desa Air Hitam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

A, Santoso dan Heroepoeteri A, *Peran Serta Masyarakat dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Hukum dan Demokras*”, (Bandung: PT Alumni, 2005), h. 2

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 56

Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. “Kamus Tata Ruang” . 1997

- Fadlan. "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam: Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera", *Al-Ihkam*, Vol. 5, No. 2, 2010.
- Harahap, Isnaini. *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Perdana Publishing, 2018)
- Herlina, Lin. "Partisipasi sebagai salah satu Determinan dalam Pembangunan Desa". *Tesis*. Institut Teknologi Bandung, 2003, h. 23
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Makro Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Kodoatie, R. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003).
- Kogoya, Teraik., Benu Olfie, dan Olly Esry Laoh. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15, No. 2, 2015, Universitas Sam Ratulangi.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millenium, Jilid 2, (Jakarta: Prenhallindo, 2002)
- Mardikanto. *Cooperate Social Responsibility Tanggung Jawab Social Koorporas*, (Bandung: Alfabeth, 2014)
- Nurmadimah, F., 2012. Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UPT dengan Skema KPS. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Oetomo, Jakob. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Gamedia Pustaka Utama 1984).
- Poerwadarminta. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka, 2003).
- Ridha, Fahrul. "Analisis Pengelolaan Dana Desa", *At-tawasuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rifa'i, Moh. *Tafsir al-Qur'an al-Karim; Terjemah/Tafsir Al-Qur'an*. (Semarang: Wicaksana, 1993).
- Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah. *Perencanaan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2004).
- Soedjono, Abi Praja. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia* , (Surabaya: Airlangga Press, 2002)
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008)

- Soetrisno, Loekman. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2012)
- Suparmoko, Irwan M. *Ekonomi Pembangunan Desa*, (Jakarta: Duta Aksara, 2002)
- Sosilowati, Dwi. *Pengantar Ekonomi*. (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2011)
- Suhardjo, A.J. *Geografi Perdesaan Sebuah Antologi*. (Yogyakarta: IdeAs Media, 2008)
- Theresia, Aprillia., Krisnha dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung: Alfabeth, 2015).
- Theresia, Aprilia., et.al. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Todaro, Michael R. dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi kesebelas (Jakarta: Penerbit Elrangga, 2001)
- Tjiptono, Fandy. *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Otonomi Daerah.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang
- Wasistio, Ibid Sadu. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2006)

## **WEBSITE**

- Malthus, Thomas Robert. “*The Essay on The Principle of Population*”  
<http://www.ajarekonomi.com>, (Diakses pada tanggal 24 Mei 2019).
- Valeria A Zeithaml, and Mary Jo Bitner, 2000, “Service Marketing Integrating Customer Focus Accross The Firm”, Mc Grow Hill. (Diakses tanggal 23 Mei 2019), Dalam <http://www.qualitydigest.com/html/qualitydef.html.com>.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Pribadi**

1. Nama : Hanafi
2. NIM : 51151015
3. Tempat, Tanggal Lahir : Air Hitam, 16 November 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Dusun II Desa Air Hitam
6. No. Handphone : 082274886975
7. Email : Hanafifadil511@gmail.com

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri 014720 Air Hitam (2003 – 2009)
2. MTS Cipta Simpang Dolok (2009 – 2012)
3. MAS Cipta Simpang Dolok (2012 – 2015)

### **C. Riwayat Organisasi**

#### **INTRA**

1. Kabid Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam (HMJ\_EKI)  
(2017-2018)
2. Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam (DEMA\_FEBI) (2018-2019)

#### **EKSTRA**

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FEBI UINSU
2. Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Batu Bara (IPMBB)
3. Ikatan Mahasiswa Alumni Cipta Simpang Dolok (IMA CIPTA)

#### 4. Ikatan Remaja Masjid Air Hitam (IRMAH)

### Lampiran 1

#### Transkrip Wawancara

	<b>Materi Wawancara</b>
Peneliti:	Apa langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Desa Air Hitam dalam Pembangunan Infrastruktur Desa?
Informan: Bapak Alpian selaku Kepala Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara	Langkah – langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Air Hitam adalah membentuk Tim penyusun mempersiapkan perencanaan pembangunan infrastruktur mulai dari musyawarah perencanaan tingkat Dusun dalam rangka mengali usulan masyarakat sampai Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa dalam rangka mencatat dan mendata semua usulan masyarakat yang selanjutnya akan di ambil skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan benar – benar dilakukan untuk akses masyarakat.
	<b>Materi Wawancara</b>
Peneliti:	Apakah ada kendala yang dihadapi Desa Air Hitam mengenai dana untuk proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur?



<p>Informan: Bapak Alpian selaku Kepala Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara</p>	<p>Kendala yang dihadapi Desa Air Hitam dalam penyiapan dana adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat sendiri dalam hal menerima informasi tentang pentingnya pembangunan yang akan berguna bagi mereka sendiri, seperti tentang pembebasan lahan yang masih terjadi sampai saat ini. Sehingga masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Akibatnya sering terjadi penundaan bahkan kegagalan pembangunan karena kurangnya dana desa.</p>
	<p><b>Materi Wawancara</b></p>
<p>Peneliti:</p>	<p>Apa solusi yang ditempuh Pemerintah Desa Air Hitam dalam menghadapi masalah – masalah yang terjadi?</p>
<p>Informan: Bapak Alpian selaku Kepala Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara</p>	<p>Solusi yang di tempuh Pemerintah Desa Air Hitam untuk mengatasi masalah mengenai Aparat desa adalah melaksanakan/mengikuti pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Bimbingan Teknis bagi Perangkat desa agar dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus di berbagai kesempatan pertemuan rutin di tingkat RT, dan pertemuan pertemuan warga lainnya.</p>
	<p><b>Materi Wawancara</b></p>
<p>Peneliti:</p>	<p>Apa yang menjadi penyebab adanya kritik atau kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa?</p>

<p>Informan:</p> <p>Bapak Idham Khalif selaku tokoh masyarakat Desa Air Hitam Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara</p>	<p>Pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Air Hitam mulai dari sarana dan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya masih kurang karena pasalnya untuk pembuatan jalan saja sudah hampir sepuluh tahun ini hanya terjadi di situ -situ saja. Jalan yang diperbaiki hanya di beberapa dusun saja dan tidak merata pembangunan fasilitas yang ada di setiap dusun. Dan itu menjadi beban pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, jadi masyarakat banyak yang tidak puas dan menilai aparat desa terkesan lamban dalam mengelola pembangunan.</p>
--	---

	<b>Materi Wawancara</b>
<p>Peneliti:</p>	<p>Apa yang menjadi penyebab adanya kritik atau kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa?</p>
<p>Informan:</p> <p>Ibu Herlina selaku masyarakat umum Desa Air Hitam Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara</p>	<p>Saya melihat hanya dari sudut pandang sebagai masyarakat awam saja, yang dirasakan dari pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam ini sudah cukup baik, tetapi kondisi tentang kurang meratanya pembangunan fasilitas yang ada di desa air hitam ini memang benar. Ada perbedaan fasilitas di setiap dusun, seperti jalan di Dusun III ini masih jelek, berbeda dengan Dusun VII yang sudah jauh lebih baik</p>
	<b>Materi Wawancara</b>

<p>Peneliti:</p>	<p>Apa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Air Hitam dengan adanya pembangunan infrastruktur desa ini?</p>
<p>Informan:</p> <p>Bapak Idham Khalif selaku tokoh masyarakat Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara</p>	<p>Dampak yang dirasakan adalah sangat positif karena pembangunan infrastruktur sangat menunjang kehidupan masyarakat Desa Air Hitam yakni dapat meningkatkan mutu kualitas infrastruktur pedesaan khususnya jalan dan jembatan serta secara ekonomi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Serta meningkatkan taraf hidup karena terjadi pergerakan ekonomi baik bagi tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur maupun masyarakat umum selaku pemanfaat atas pembangunan infrastruktur tersebut karena memudahkan transportasi sehingga kegiatan masyarakat secara umum lebih efektif dan efisien</p>

### Lampiran 3

#### Dokumentasi



(Bersama PJS Desa Air Hitam)  
Hitam)

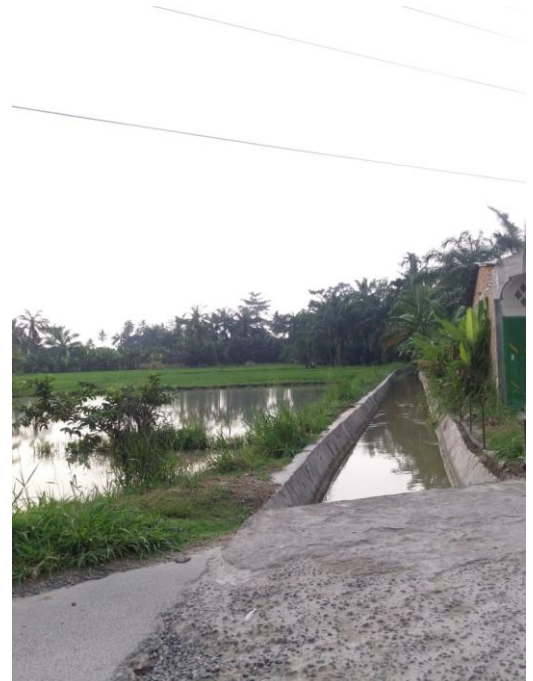


(Jalan Dusun III Desa Air Hitam)  
Air Hitam)

(Balai Desa Desa Air



(Salah Satu Masjid Desa



(Proses Pembuatan Parit Jalan)



(Saluran Pembuangan Air)



(Jalan Desa yang belum di aspal)  
Dusun II)

(Perbatasan aspal antara Dusun I dan



(Jalan di Dusun yang sudah di aspal)

(Parit Jalan Dusun VI)